



SUPLEMEN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**HALAMAN BELAKANG COVER
SEGAJA DIKOSONGKAN**



**SUPLEMEN REVISI
PERJANJIAN
KINERJA
TAHUN 2022**

**Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

KATA PENGANTAR

Dokumen Suplemen Revisi Perjanjian Kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) tahun 2022 ini merupakan dokumen pendukung yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Suplemen Revisi Perjanjian Kinerja ini memuat informasi tambahan atas berbagai upaya dan keberhasilan Ditjen Gakkum LHK dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Rencana Strategi Ditjen Gakkum LHK tahun 2020 s.d 2024, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan Suplemen Revisi Perjanjian Kinerja ini diharapkan adanya dukungan atas tercapainya optimalisasi peran Ditjen Gakkum LHK di dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Ditjen Gakkum LHK.

Jakarta, 30 Desember 2022

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



Rasio Ridho Sani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. HIGH LIGHT PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022.	1
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

A. HIGH LIGHT PENEGAKAN HUKUM LHK TAHUN 2022*

DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pagu Rp290.336.221.000,-



Rp190.537.113.000,-
Program Dukungan
Manajemen



Rp33.242.506.000,-
Program
Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan



Rp66.556.602.000,-
Program Kualitas
Lingkungan Hidup

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK) telah melakukan 2 (dua) kali realokasi *Automatic Adjustment* ke BA BUN dengan total Rp46.154.225.000,- atau 14,19% dari Pagu semula sebesar Rp325.338.075.000,-

Ditjen PHLHK mendukung Prioritas Nasional 6 sebesar Rp93.376.242.000,- atau sebesar 32,2% dari pagu total Ditjen PHLHK.

KINERJA YANG HENDAK DICAPAI



48 Persen

Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan



182 Kasus

Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup yang ditangani



300.000 Hektar

Luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan hutan, serta perusakan lingkungan



76 Poin

Nilai SAKIP Ditjen PHLHK

LAMPIRAN-LAMPIRAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc


Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

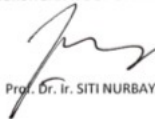
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Meningkatkan Budaya Ketaatan terhadap Perundangan undangan dan Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Kejahatan LHK	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	65 Persen	48 Persen
		Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup yang ditangani	182 Perkara	182 Perkara
b.	Mengamankan Hutan dan lingkungan dari ancaman dan gangguan hutan, serta perusakan lingkungan	Luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan hutan, serta perusakan lingkungan	300.000 Hektar	300.000 Hektar
c.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	76 Poin	76 Poin

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	
		Semula	Menjadi
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	93.976.600.000	66.556.602.000
1.	Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi.		
2.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH).		
3.	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.		
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	44.439.400.000	33.242.506.000
4.	Pencegahan dan Pengamanan Hutan.		
	Program Dukungan Manajemen	186.922.075.000	190.537.113.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.		

Jakarta, 29 Desember 2022

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK

Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A
NIP. 19760108 200312 1 005

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76 Poin
		Nilai Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3 Poin
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Tertib dan Akuntabel	1 Laporan

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK

Anggaran

Rp57.875.113.000,00

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK

Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A
NIP. 19760108 200312 1 005



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmin Ragil Utomo, SH, MM

Jabatan : Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup

Jasmin Ragil Utomo, SH, MM
NIP. 19640603 199203 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	22 Perkara

Kegiatan :
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Anggaran :
Rp7.947.904.000,00

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,

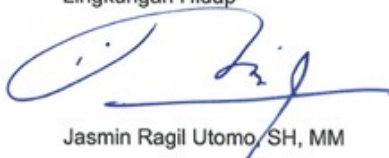
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup



Jasmin Ragil Utomo, SH, MM
NIP. 19640603 199203 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vinda Damayanti, S.Si, M.Sc

Jabatan : Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Pengaduan,
Pengawasan dan Sanksi
Administrasi LHK

Vinda Damayanti, S.Si, M.Sc
NIP. 19691204 199503 2 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	268 Badan Usaha
		Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya	125 Orang

Kegiatan :
 Penanganan Pengaduan, Pengawasan
 dan Sanksi Administrasi LHK

Anggaran
 Rp10.639.416.000,00

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
 NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
 Direktur Pengaduan,
 Pengawasan dan Sanksi
 Administrasi LHK



Vinda Damayanti, S.Si, M.Sc
 NIP. 19691204 199503 2 002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sustyo Iriyono, M.Si

Jabatan : Plt. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Pencegahan dan
Pengamanan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	13 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	6 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang

Kegiatan:
Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan

Anggaran :
Rp16.457.035.000,00

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



Dr. Rasio Ridho Sani, M. Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Plt. Direktur Pencegahan dan
Pengamanan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan



Ir. Sustyo Wiyono, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yazid Nurhuda, S.H., M.A

Jabatan : Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Penegakan Hukum Pidana,
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Yazid Nurhuda, S.H., M.A
NIP 19681209 199303 1 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	6 Perkara
		Jumlah Penanganan Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan yang ditindaklanjuti	50 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	162 Orang

Kegiatan :
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Anggaran :
Rp13.595.561.000,00

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Penegakan Hukum Pidana
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Yazid Nurhuda, S.H., M.A
NIP 19681209 199303 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subhan, S.Hut, M.Si
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Sumatera

Subhan, S.Hut, M.Si
NIP. 19730320 199903 1 004

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH WILAYAH SUMATERA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	4 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	4 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang
2	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	143 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
3	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	28 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang
4	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1 Layanan

Kegiatan

1. Pencegahan dan Pengamanan LHK
2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK
3. Penegakan Hukum Pidana LHK
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK

Anggaran


Rp 3.902.497.000,00
 Rp 2.490.018.000,00
 Rp 5.494.290.000,00
 Rp31.164.840.000,00

Total Anggaran

Rp43.051.645.000,00

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan


 Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
 Kepala Balai PPH LHK
 Wilayah Sumatera


 Subhan, S.Hut, M.Si
 NIP. 19730320 199903 1 004



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taquiddin, S.Hut., M.P
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Taquiddin, S.Hut., M.P
NIP. 19740628 199903 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	4 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	4 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang
2	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	98 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
3	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	24 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang
4	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1 Layanan

Kegiatan :

Anggaran

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Pencegahan dan Pengamanan LHK | Rp 3.360.143.000,00 |
| 2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK | Rp 1.867.255.000,00 |
| 3. Penegakan Hukum Pidana LHK | Rp 8.268.353.000,00 |
| 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK | Rp27.689.994.000,00 |

Total Anggaran

Rp41.185.745.000,00

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,

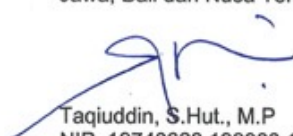
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai PPH LHK Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Taquiuddin, S.Hut., M.P
NIP. 19740628 199903 1 002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eduward Hutapea, S.Si
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Kalimantan

Eduward Hutapea, S.Si
NIP. 19690406 199903 1 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	4 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	6 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang
2	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	131 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
3	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	26 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang
4	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1 Layanan

Kegiatan :

Anggaran

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Pencegahan dan Pengamanan LHK | Rp 3.729.135.000,00 |
| 2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK | Rp 2.911.627.000,00 |
| 3. Penegakan Hukum Pidana LHK | Rp 5.292.495.000,00 |
| 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK | Rp25.897.561.000,00 |

Total Anggaran

Rp37.830.818.000,00

Jakarta, 25 Desember 2022

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai PPH LHK Wilayah Kalimantan



Eduward Hutapea, S.Si
NIP. 19690406 199903 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Sulawesi

Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H
NIP. 19751206 199803 1 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	4 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	4 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang
2	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	80 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
3	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	19 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang
4	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1 Layanan

Kegiatan :

1. Pencegahan dan Pengamanan LHK	Rp 4.607.982.000,00
2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK	Rp 2.146.769.000,00
3. Penegakan Hukum Pidana LHK	Rp 4.425.934.000,00
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis, Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK	Rp24.835.737.000,00

Total Anggaran

Rp36.016.422.000,00

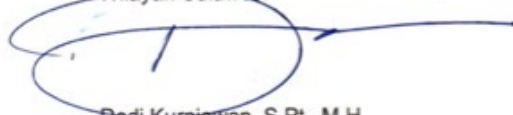
Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Sulawesi



Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H
NIP. 19751206 199803 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Maluku Papua

Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750610 200003 1 002

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	2 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	4 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang
2	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	20 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
3	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	7 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang
4	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1 Layanan

Kegiatan :

1. Pencegahan dan Pengamanan LHK
2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK
3. Penegakan Hukum Pidana LHK
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK

Anggaran

Rp 2.703.794.000,00
Rp 839.480.000,00
Rp 3.528.909.000,00
Rp18.664.379.000,00

Total Anggaran

Rp25.736.562.000,00

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH LHK
Wilayah Maluku Papua



Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750610 200003 1 002



**Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
2022**

**Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4
Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta**